

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

Septian Boy Alpin Sitorus

NPP. 29.0164

*Asdaf Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: septiansitorus19@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Floods are the most frequent hydrometeorological disasters that occur in various regions in Indonesia, including the City of Tebing Tinggi. Flood disasters that regularly occur every year can hamper the government's work program and, ultimately, the daily activities of the community. **Purpose:** BPBD, as an agency formed by the government as a forum for disaster management, has a role to play in dealing with disasters starting from the pre-disaster, emergency response, and post-disaster stages so as to create a community that is alert and resilient to disasters. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. **Method:** Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation, and documentation. The obtained data were then qualitatively analyzed by reviewing all of the data supported by the results of interviews with the theoretical approach proposed by Sondang P. Siagian that the role of the organization is the role of stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and implementer alone. **Result:** From the results of the study, it can be seen that the role of BPBD in flood disaster management in Tebing Tinggi City is seen to have been implemented well but has not been maximized. Because there are still shortcomings in the budget aspect, the human resources aspect in the internal BPBD of Tebing Tinggi City, and the culture of the people who are still apathetic. **Conclusion:** However, the Tebing Tinggi City BPBD is trying as much as possible with other stakeholders to increase employee competence and implement community-based disaster reduction policies so that the impact caused by the flood disaster is minimized.

Keywords: Role, BPBD, Flood Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk diantaranya adalah Kota Tebing Tinggi. Bencana banjir yang rutin terjadi setiap tahunnya pada akhirnya dapat menghambat program kerja pemerintah dan menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui BPBD selaku badan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai wadah dalam penanggulangan bencana memiliki peran untuk menanggulangi bencana mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana sehingga mewujudkan masyarakat yang waspada dan tangguh terhadap bencana.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau semua data yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian bahwa peran organisasi pemerintah yaitu peran sebagai stabilisator, peran sebagai inovator, peran sebagai modernisator, peran sebagai pelopor, serta peran sebagai pelaksana sendiri. **Hasil/Temuan:** Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Tebing Tinggi ditinjau telah terlaksana dengan cukup baik namun belum maksimal. Karena masih ada kekurangan pada aspek anggaran, aspek sumber daya manusia di internal BPBD Kota Tebing Tinggi, dan kultur masyarakat yang masih apatis. **Kesimpulan:** Meskipun demikian BPBD Kota Tebing Tinggi berupaya semaksimal mungkin bersama stakeholders lain dengan melakukan peningkatan kompetensi pegawai dan melaksanakan kebijakan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat agar dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir dapat diminimalisir.

Kata kunci: Peran, BPBD, Penanggulangan Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan memiliki wilayah yang luas. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Letaknya juga pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif terpenting di dunia, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai kawasan rawan bencana alam. Indonesia juga beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Negara dengan iklim tropis memastikan Indonesia memiliki curah hujan dan suhu udara yang lembab. Hal ini merupakan ancaman terhadap bencana hidrometeorologi.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh parameter hidrologi dan meteorologi seperti perubahan volume air sungai, curah hujan, kelembaban, suhu dan angin. Kondisi cuaca ini dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, hujan es, angin puting beliung, atau kekeringan. Banjir adalah keadaan dimana air pada saluran drainase (daerah aliran sungai) tidak dapat diserap atau aliran air pada saluran drainase tersumbat sehingga membanjiri dataran banjir di sekitarnya (Suripin, 2004). Penanggulangan bencana banjir harus dilaksanakan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan alam.

Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana mencakup setiap tindakan atau upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bahaya. Dengan kata lain, penanggulangan bencana atau mitigasi berusaha untuk memperkecil kemungkinan terjadinya bencana atau mengurangi efek negatif bencana. Setiap bencana memiliki perbedaan karakteristik dan dampak yang akan diakibatkan terhadap manusia. Demikian juga, setiap bencana memiliki karakteristik berbeda-beda sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda-beda juga.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik ditingkat nasional maupun daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk oleh pemerintah pusat sebagai realisasi dari UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana tepatnya pada Pasal 10 ayat (1). Pada Pasal 10 ayat (2) UU tersebut dijelaskan bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri. Sedangkan pada Pasal 18 diamanatkan untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kotamadya. BPBD berperan dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi melalui tindakan yang cepat dan tepat, efektif dan efisien. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah dibentuk BPBD.

BPBD di Provinsi Sumatera Utara berperan penting dalam penanggulangan bencana banjir, karena di daerah ini memiliki potensi banjir yang cukup tinggi.

Pada tahun 2021, terdapat beberapa Kabupaten / Kota di Sumatera Utara yang berpotensi terkena banjir. Wilayah banjir berdasarkan peta rawan banjir di Sumatera Utara meliputi Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai, Kota Tanjung Pura, Kota Sei Rampah, Kota Pematang Siantar, Kota Natal, Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat. Kota Tebing Tinggi adalah salah satu wilayah yang berada di provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi terjadi bencana banjir, berdasarkan data BMKG daerah Kota Tebing Tinggi (Kec. Bajenis, Kota Tebingtinggi, Padang Hilir, Padang Hulu, Rambutan) memiliki tingkat potensi rawan banjir kategori menengah.

Berdasarkan laporan dari BPBD Sumatera Utara, pada November 2020, Kota Tebing Tinggi terendam akibat bencana banjir. Dalam musibah tersebut, 5 kecamatan di Kota Tebing Tinggi yang terendam banjir adalah Kecamatan 5 Tebing Tinggi Kota, Kecamatan Padang Hulu, Kecamatan Rambutan, dan Kecamatan Bajenis. Terkonfirmasi terdapat 25.297 jiwa yang terdampak banjir per 28 November 2020. Bencana banjir pada tahun 2020 di kota tebing tinggi menyebabkan banyak kerugian di berbagai aspek, baik itu infrastruktur, perumahan, peternakan, perikanan, pertanian, dan juga bangunan sekolah ataupun fasilitas umum yang terdampak banjir. Selain itu bencana banjir menyebabkan tanggul jebol, prediksi kerugian akibat bencana banjir mencapai 50 Miliar.

Berbagai upaya mitigasi telah dilakukan untuk menanggulangi banjir di Kota Tebing Tinggi, khususnya di wilayah sungai. Pekerjaan pencegahan banjir dimulai dengan pengerukan di sepanjang Sungai Bahbilang untuk dapat menampung volume air yang lebih banyak dan perbaikan tanggul untuk menghambat luapan air di sungai Sei padang. Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi melaksanakan berbagai perbaikan dalam penanggulangan banjir tetapi masalah banjir tetap terjadi setiap tahunnya terutama pada saat musim penghujan. Hal ini dikarenakan upaya mitigasi yang dijalankan masih terkendala oleh teknis dan faktor alam. Salah satu cara untuk mengurangi kerugian saat terjadi banjir yaitu dengan menyusun peta rawan bencana dan memperkirakan waktu rawan terjadinya banjir. Dengan demikian, mitigasi yang dilakukan dapat tepat dan akurat. Sungai Sei Padang menjadi fokus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tebing tinggi dalam melakukan upaya mitigasi, dari berbagai alternatif upaya mitigasi banjir, prioritas utamanya adalah menormalisasi muara sungai, memperbaiki koordinasi antar instansi terkait mitigasi banjir, dan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat (Raflus et al., 2018).

BPBD Kota Tebing Tinggi sebagai pelaksana fungsi pemerintahan dalam hal ini yaitu menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat dari bahaya bencana banjir, landasan legalistik seperti UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dibentuk guna menjadi acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan menjadi dasar kewenangan dalam bertugas untuk melaksanakan fungsi lembaga tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah

Bencana yang selalu terjadi di Indonesia dengan peringkat keenam di dunia adalah banjir. Bencana banjir memang selalu menjadi bencana yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Menurut analisis dari Aqeduct Global Flood Analyzer, Indonesia merupakan negara keenam yang paling

terdampak banjir di dunia. Dengan melihat analisis diatas, sudah membuktikan bahwa Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dalam kasus bencana banjir. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana yang sering terjadi di Indonesia dengan 464 kasus per tahun adalah bencana banjir. Banyaknya kasus banjir di Indonesia pastinya merugikan masyarakat setempat yang tinggal di wilayah rawan banjir. Diperlukan penanganan khusus untuk menangani masalah ini, melalui penanggulangan bencana yang meliputi, pra bencana (sebelum terjadi bencana kemudian tanggap darurat (ketika terjadi bencana) dan pasca bencana (setelah terjadi bencana).

Hidup di wilayah dengan curah hujan yang tinggi, yang rentan terhadap bencana alam, harus mempunyai rasa kewaspadaan yang tinggi. Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana alam. Oleh karena itu, mitigasi harus dipandang sebagai upaya dan kegiatan untuk mengurangi dan meminimalkan bencana yang perlu disosialisasikan secara cepat dan tepat.

Kota Tebing Tinggi merupakan daerah yang rawan terjadi banjir sehingga menyebabkan masyarakat terpaksa harus mengungsi setiap tahunnya. Karena baik volume air dan durasi genangan banjir yang cukup lama menggenangi pemukiman penduduk menyebabkan kerugian baik materil maupun immaterial. Permasalahan banjir di Kota Tebing Tinggi disebabkan oleh tingginya curah hujan dan infrastruktur yang kurang memadai.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Ketiga fase dari pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi menjadi tanggung jawab pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi memiliki tugas menyelenggarakan fungsinya seperti perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir dan terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir. Penelitian oleh Lorensia Sitanggang (2017) yang berjudul Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Di Kota Medan Di Kantor BPBD Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Samarinda Menelaah kemampuan BPBD Kota Medan dalam menanggulangi bencana dilihat dari peningkatan sumber daya, kompetensi, etika dan pelaksanaannya. Temuan hasil penelitian tersebut yaitu BPBD Kota Medan masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk yang menangani bencana. Jumlah Pegawai Negeri Sipil masih belum memadai, Bukan hanya itu, BPBD Kota Medan masih membutuhkan pegawai harian lepas. Peran BPBD Kota Medan sebagai koordinator dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kota medan sudah efektif namun masih harus dibutuhkannya pertemuan-pertemuan namun masih terdapat tumpang tindih kewenangan.

Penelitian Aurellia Chintia, Deby H Yaqub Cikusin, Roni Pindahanto W (2018) mengkaji Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana (Studi Manajemen Bencana). Menelaah peran BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana,

penelitian menggunakan indikator peranan menurut soekanto yaitu peran aktif, pasif, partisipatif. Hasil temuan penelitian tersebut yaitu BPBD telah memiliki strategi kesiapsiagaan yang tertuang pada Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (RENSTRA SKPD). Faktor pendukung dalam peran BPBD baik anggaran pemerintah daerah setempat dan aparatur yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi keahlian dalam penanggulangan bencana.

Penelitian Tiurrina Soneta Br Ginting (2018) menggali Koordinasi Badan Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten karo dalam penanggulangan bencana erupsi gunung sinabung. Menelaah koodinasi BPBD dalam penanggulangan bencana gunung api dengan Dinas-Dinas Pemerintahan dan organisasi masyarakat. BPBD sebagai garda terdepan menjadi koordinator dalam mengerakkan badan-badan lainnya. Namun, BPBD Kota Medan memang memiliki peta rawan bencana khusus kota yang disusun, diresmikan, dan ditunjukkan kepada penduduknya secara utuh dan jelas untuk keperluan perkiraan bencana dan evakuasi. Hasil penelitian tersebut yaitu koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung belum terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena BPBD Kabupaten Karo memang baru terbentuk sehingga pengetahuan khusus tentang kebencanaan masih kurang dan komunikasi yang tidak lancar antara instansi terkait.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana baik konteks dan lokus penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berjudul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan banjir di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Tebing Tinggi, selain itu fokus penelitian ini yaitu penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Pada teori peran yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori peran dari Siagian (2012: 142-150) yang menyatakan bahwa peran ialah upaya yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern kemudian ada lima peran dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan sendiri.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan banjir di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat penanggulangan banjir di Kota Kota Tebing Tinggi. Tujuan lainnya yaitu mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengatasi faktor penghambat dalam penanggulangan banjir di Kota Kota Tebing Tinggi.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Penulis melaksanakan penelitian kualitatif berdasarkan acuan dari pendapat Lexy J. Moleong (2005:39), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan hal lainnya secara keseluruhan dengan cara mendeskripsikannya ke dalam bentuk kata dan frasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Peneliti juga menggunakan metode induktif, dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menganggulangi bencana banjir. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti perlu melakukan wawancara mendalam kepada subjek penelitian untuk mendapatkan data-data yang kemudian dapat diinterpretasi oleh peneliti. Penelitian kualitatif tersebut juga akan mendeskripsikan dan menunjukkan nilai-nilai dan karakteristik apa saja yang diterapkan dalam suatu organisasi

Penulis mengumpulkan data melalui, wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Tebing Tinggi, Kepala Sekretariat BPBD Kota Tebing Tinggi, kepala sub bagian umum, kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, kasi Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir 3 orang). Adapun analisisnya menggunakan teknis analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246) yang menyatakan bahwa teknik analisis data terbagi menjadi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan banjir di Kota Tebing Tinggi menggunakan pendapat dari Siagian yang menyatakan bahwa peran pemerintah terjadi pada lima tahap, yaitu peran sebagai stabilisator, peran sebagai inovator, peran sebagai modernisator, peran sebagai pelopor dan peran sebagai pelaksana sendiri. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran Sebagai Stabilisator

Peran BPBD Kota Tebing Tinggi Selaku Stabilisator yaitu menjaga stabilitas masyarakat agar aman dan tentram sehingga aktifitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan melalui program, kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa kendala. BPBD Kota Tebing Tinggi sebagai organisasi pemerintah memiliki tugas memberikan rasa aman terhadap bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba, untuk memberikan rasa aman tersebut kebijakan yang dilakukan BPBD adalah peningkatan kapasitas berbasis masyarakat. Peningkatan kapasitas berbasis masyarakat yaitu pemberian edukasi kepada masyarakat sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap bencana banjir. Salah satu bentuk peningkatan kapasitas masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan banjir terutama pada musim penghujan tiba dan memberikan peringatan dini jika terjadi hujan deras, peringatan dini bertujuan agar masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana banjir. Dalam hasil wawancara dengan Kepala pelaksana BPBD Kota Tebing Tinggi menunjukkan BPBD telah

melaksanakan kegiatan pra bencana dengan sangat baik dalam memberikan pemahaman tentang bencana banjir kepada masyarakat. Sosialisasi kebencanaan dilaksanakan dengan menargetkan masyarakat yang bermukim di daerah yang rawan banjir seperti kelurahan persiakan dan kecamatan pabatu. Kedua daerah tersebut merupakan pemukiman yang selalu di tergenang bencana banjir dalam durasi yang lama di banding daerah lainnya di Kota Tebing Tinggi. Melalui peningkatan kapasitas bencana berbasis masyarakat banjir di kedua wilayah tersebut maka kerugian masyarakat dapat diminimalisir dan tidak menyebabkan korban jiwa. dalam meningkatkan kesiapsiagaan rutin mengadakan gladi posko dan gladi lapangan dengan hasil baik BPBD maupun masyarakat mendapat gambaran langsung ketika bencana terjadi sehingga saat terjadi bencana dapat tercipta koordinasi dan tindakan yang terukur. Peningkatan kesiapsiagaan sendiri belum maksimal karena fokus anggaran di BPBD menitikberatkan pada bidang lain maka dapat disimpulkan walau paradigma kebencanaan telah berubah ke arah tindakan preventif namun pada prakteknya masih fokus pada kegiatan represif. Studi kebencanaan juga dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk memberi gambaran kekurangan yang ada di masyarakat untuk di jadikan dasar dalam membuat kebijakan.

3.2. Peran Sebagai Inovator

Peran sebagai Inovator yaitu peran organisasi pemerintah menciptakan ide baru menjadi sebuah kebijakan atau menciptakan sebuah mekanisme baru untuk efektifitas dan efisiensi waktu, tetapi inovasi juga bisa berarti membangun dan memperbaiki solusi yang sudah ada. Salah aspek yang membutuhkan inovasi yaitu standar operasional prosedur dimana selalu membutuhkan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Standar operasional prosedur merupakan suatu mekanisme Kerjasama terstruktur memuat Langkah-langkah yang akan diambil Ketika terjadi bencana, mekanisme tersebut disusun dan disepakati bersama oleh semua insitusi pelaksana dan mengatur tugas, kewenangan, koordinasi antar insititusi tersebut. Dalam penanggulangan bencana yang membutuhkan waktu yang singkat seperti bencana banjir di Kota Tebing Tinggi, inovasi sangat diperlukan terutama inovasi sistem operasional kerja untuk mempersingkat jalur koordinasi dan mempercepat penanganan agar dampak bencana yang ditimbulkan ke masyarakat dapat diminimalisir.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjelaskan inovasi metode kerja dan program di Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang belum optimal, inovasi dari internal BPBD Kota Tebing Tinggi sendiri dalam metode kerja masih pasif dan mengandalkan kebijakan BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan dalam program Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan memiliki inovasi yaitu Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA), KELTANA sendiri yaitu program pemerintah berupa fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat kelurahan untuk Menyusun dokumen penanggulangan bencana banjir, Serta pelatihan dan fasilitasi masyarakat untuk berkoordinasi kepada instansi terkait dalam rangka pembangunan wilayah kelurahan yang mengikuti dokumen hasil studi penanggulanga bencana agar meminimalisir daerah rawan bencana di kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mengungkapkan jika inovasi yang sedang disusun yaitu pemberdayaan anggota pramuka dan taruna siaga bencana untuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Di BPBD Kota Tebing Tinggi pemberdayaan anggota pramuka dan taruna siaga bencana merupakan sebuah inovasi yang tergolong baru karena BPBD masih kekurangan sumber daya manusia contohnya pada saat Ketika terjadi bencana, dimana evakuasi masyarakat sering terkendala dan membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga menyebabkan kerugian yang lebih besar. Pemberdayaan anggota pramuka dan taruna siaga bencana masih dalam

tahap perencanaan, program tersebut akan mulai dilaksanakan setelah diresmikan. Dalam menjalankan program tersebut memuat pemberian insentif yang bertujuan meningkatkan kinerja Pramuka dan Taruna siaga bencana dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

Pernyataan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi di simpulkan BPBD merupakan instansi yang aktif dalam penyusunan SOP penanggulangan bencana banjir karena BPBD merupakan instansi terdepan dalam penanggulangan bencana. Standar operasional prosedur bertujuan mengharmonisasi kewenangan antar instansi dan keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan resiko bencana sehingga tercapai efisiensi, efektifitas dan peningkatan kinerja pemerintah Kota Tebing Tinggi.

3.3. Peran Sebagai Modernisator

Sebagai organisasi pemerintah BPBD Kota Tebing Tinggi harus mampu bertransformasi dengan kebutuhan masyarakat baik melalui transformasi struktur organisasi, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan kebencanaan, maupun perubahan paradigma di masyarakat tentang penanggulangan bencana banjir. Perubahan paradigma masyarakat yang sebelumnya menitik beratkan pada penanganan respons bencana bertransformasi menjadi kesiapsiagaan.

BPBD Kota Tebing Tinggi menyadari peningkatan kapasitas pegawai sangat di perlukan terutama saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Dengan demikian untuk meningkatkan kapasitas pegawainya BPBD Kota Tebing Tinggi bekerjasama dengan BPBD Provinsi Sumatera Utara, BNPB, POLRI dan TNI. Kerjasama dengan instansi-instansi tersebut dikarenakan kompetensi yang belum memadai dari BPBD sendiri sehingga membutuhkan Kerjasama dengan instansi lain yang telah memiliki kompetensi. Salah satu contoh peningkatan kapasitas pegawai BPBD yaitu dengan mengadakan gladi posko dan gladi lapangan yang rutin dilaksanakan saat musim penghujan akan datang. Gladi posko dan gladi lapangan yang dilakukan bertujuan selain meningkatkan koordinasi antar instansi juga melatih kompetensi anggota BPBD dalam penanggulangan bencana banjir.

Peran BPBD sebagai modernisator tidak hanya dilakukan pada anggota BPBD saja namun kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat sebagai sasaran utama dari setiap kegiatan BPBD itu sendiri, selain itu peningkatan pengetahuan kebencanaan di masyarakat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bencana seperti banjir. Dengan meningkatnya pemahaman di masyarakat maka masyarakat dapat melihat isu-isu yang ada sebelum bencana terjadi kemudian dapat mengambil tindakan sesuai dengan pemahaman yang telah didapat sebelumnya.

kegiatan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan di BPBD Kota Tebing Tinggi yang telah intensif di lakukan beberapa tahun belakangan, Untuk merubah pemahaman masyarakat dari tanggap darurat ke pengurangan resiko bencana. Perkembangan ilmu pengetahuan mendorong masyarakat berpandangan bahwa bencana timbul di karenakan proses geofisik, geologi, dan hidrometeorologi yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Berdasarkan pandangan tersebut BPBD Kota Tebing Tinggi mengadakan sosialisasi kebencanaan agar masyarakat lebih peduli kepada lingkungannya, salah satunya dengan sosialisasi melarang mendirikan pemukiman di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan membangun rumah lebih tinggi dari jalan raya. Salah satu daerah yang menjadi fokus utama kegiatan sosialisasi tersebut yaitu daerah kecamatan Padang Hulu di daerah Persiakan.

3.4. Peran Sebagai Pelopor

Sebagai organisasi pemerintah yang dibentuk untuk menanggulangi bencana baik pada saat pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana menjadikan BPBD Kota Tebing Tinggi harus dapat mengambil tindakan dan upaya yang maksimal tidak hanya ketika banjir tetapi juga meminimalisir terjadinya bencana banjir tersebut. Penanggulangan bencana banjir merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang tidak hanya bertumpu pada satu organisasi yaitu BPBD saja namun membutuhkan koordinasi lintas bidang, Maka untuk mengefektifkan kinerja dan koordinasi antar stake holder tersebut BPBD berperan sebagai pelopor dan fasilitator yang aktif mengukseskan program-program penanggulangan bencana banjir di Kota Tebing Tinggi dan termasuk upaya pencegahan banjir, evakuasi dan perlindungan pengungsi, upaya rekonstruksi pasca bencana.

BPBD Kota Tebing Tinggi bertindak sebagai pelopor dalam penanggulangan bencana, hal ini didukung pula dengan naiknya status BPBD menjadi badan yang setingkat dengan dinas untuk mempermudah koordinasi antar badan. Langkah-langkah yang dilakukan BPBD Kota Tebing Tinggi sebagai kepeloporan dalam penanggulangan bencana banjir yaitu penyusunan kajian resiko bencana, kajian resiko bencana dibuat bersama-sama dengan semua stakeholder terkait dengan memadukan data Lembaga masing-masing. Dalam kajian resiko bencana tersebut memuat kondisi geografi, demografis, indeks resiko bencana dan memperjelas secara mendetail peran masing-masing stakeholder dalam penanggulangan banjir di Kota Tebing Tinggi. Hasil kajian resiko bencana juga dapat menjadi acuan Lembaga terkait dalam mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir.

BPBD memiliki keseriusan sebagai pelopor dalam menghadapi bencana banjir dimana BPBD berusaha menjadi Lembaga pemerintah pertama yang tiba pada saat terjadi bencana. Meskipun demikian pada saat waktu yang krusial seperti pada saat tanggap darurat tidak dapat di pungkiri BPBD membutuhkan Lembaga lain seperti dinas Kesehatan dan TNI-POLRI untuk mengevakuasi masyarakat dan meminimalisir korban. Pada saat pra bencana kebijakan BPBD sebagai kepeloporan dalam penanggulangan banjir yaitu dengan membentuk kelurahan Tangguh bencana yang telah dilaksanakan di dua kelurahan dan akan dilakukan juga ke semua kelurahan di Kota Tebing Tinggi terutama di daerah rawan banjir terlebih dahulu. Penanganan bencana banjir sangatlah penting untuk itu organisasi yang harus menjadi pelopor adalah BPBD. Kepeloporan BPBD dalamantisipasi banjir dilakukan melalui langkah-langkah normalisasi sungai pada daerah yang rawan banjir agar sungai-sungai yang dianggap menjadi penyebab banjir dapat menampung debit air yang banyak. Berdasarkan keterangan salah satu anggota masyarakat tersebut BPBD melalui bidang III rekonstruksi dan rehabilitasi telah menjalankan program pembangunan yaitu pembangunan bronjong dan dinding penahan banjir untuk menormalisasi sungai dan mencegah abrasi dari air sungai sehingga tidak terjadi pendangkalan sungai. Program pembangunan tersebut merupakan program inisiatif dari BPBD dan sumber dana dalam pembangunan tersebut berasal dari BPBD sendiri. Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan BPBD telah melaksanakan perannya sebagai pelopor dalam penanggulangan banjir dimana manfaat kedua pembangunan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat, tinggi genangan banjir telah berkurang dan durasi genangan banjir menjadi lebih singkat.

3.5. Peran Sebagai Pelaksana Sendiri

Kegiatan penanggulangan banjir di pemerintah Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kegiatan pembangunan dalam rangka penanggulangan bencana banjir di Kota

Tebing Tinggi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bukan semata-mata menjadi beban pemerintah. Berbagai penyebab penanggulangan bencana hanya dilakukan oleh BPBD yaitu keselamatan masyarakat, sarana prasarana yang terbatas, kompetensi yang belum memadai dari masyarakat dan tidak diminati oleh masyarakat ataupun sektor swasta. Sangat mungkin juga berbagai kegiatan yang dilakukan tidak bisa di serahkan kepada swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Sarana yang dipergunakan BPBD saat ini dalam penanggulangan bencana banjir merupakan sarana yang didapat melalui BNPB, BPBD provinsi Sumatera Utara maupun sarana yang berasal dari anggaran belanja pemerintah Kota Tebing Tinggi.

sarana prasarana untuk BPBD sendiri telah lengkap namun belum mencukupi dari segi kuantitas untuk dipergunakan dalam penanggulangan bencana banjir. Berdasarkan hasil observasi lapangan peneliti mengetahui bahwa alat-alat yang ada masih bertipe standar untuk melakukan penanggulangan bencana banjir.

Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kota Tebing Tinggi saat ini digunakan dalam penanggulangan bencana banjir, namun dari segi kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana tersebut belum mencukupi. Hal tersebut dikarenakan ketika saat tanggap darurat banjir bandang di Kota Tebing Tinggi BPBD harus meminta bantuan sarana prasarana tambahan kepada BASARNAS, BPBD Provinsi Sumatera Utara, TNI, POLRI untuk mengevakuasi korban dan mendirikan pengungsian. Meskipun demikian seluruh anggota satuan tugas banjir, tim perahu, telah dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan yang lengkap. Jika dilihat dari segi kualitas BPBD Kota Tebing Tinggi memiliki sarana dalam kondisi baik tetapi bertipe standar sehingga ketika terjadi bencana banjir di butuhkan sarana yang lebih spesifik tetapi kuantitasnya masih kurang. Contohnya pada saat banjir BPBD dalam menerjunkan perahu evakuasi harus memperhatikan kedalaman atau tinggi genangan air dimana jika genangan air rendah maka digunakan perahu fiber dan jika genangan air tinggi dapat menggunakan perahu karet, alasan perbedaan penggunaan kedua jenis perahu tersebut untuk menghindari kerusakan bisa saja timbul pada saat bencana banjir.

BPBD Kota Tebing Tinggi masih kekurangan sumber daya manusia terutama pada saat tanggap darurat, BPBD harus menetapkan prioritas wilayah terparah untuk melakukan proses evakuasi sementara pada saat tanggap darurat tersebut merupakan fase yang paling membutuhkan tindakan cepat BPBD untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya manusia BPBD melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya, tentunya sumber daya manusia perbatuan dari lembaga lain tidak dapat selalu siap membantu saat bencana. Kebutuhan akan sumber daya manusia merupakan salah satu permasalahan yang harus ditemukan solusinya karena bencana banjir merupakan bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba untuk itu dengan rekrutmen sumber daya manusia maka sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan BPBD dalam penanggulangan banjir.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana banjir selain sarana prasarana adalah anggaran. Anggaran bagi organisasi pemerintah seperti BPBD merupakan unsur yang sangat penting. Pentingnya anggaran bagi penanggulangan banjir karena beberapa alasan yaitu anggaran menjadi alat BPBD untuk melakukan pembangunan fasilitas penanggulangan banjir dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu anggaran juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam perannya sebagai pelaksana sendiri.

3.6. Faktor Pendukung BPBD Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tebing Tinggi

Faktor pendukung merupakan aspek-aspek yang turut mendukung jalannya penanggulangan banjir di Kota Tebing Tinggi, sebagai berikut:

a) Dukungan pemerintah Kota Tebing Tinggi

Dukungan pemerintah kota merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam penanggulangan bencana banjir. Dukungan yang dimaksud yaitu dukungan anggaran, dengan terjaminnya anggaran penanggulangan bencana maka memberi kepastian kepada BPBD untuk Menyusun program kerja dan implementasinya dalam penanggulangan bencana banjir.

b) Sinergitas antar instansi pemerintah di Kota Tebing Tinggi

Faktor pendukung lain dalam penanggulangan bencana banjir oleh BPBD yaitu dukungan dari berbagai instansi pemerintah di Kota Tebing Tinggi. Bentuk dari dukungan tersebut yaitu relawan kebencanaan yang membantu BPBD menjalankan fungsi dan tugasnya dalam penanggulangan bencana banjir. Relawan yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir merupakan ahli yang siap terjun dalam kondisi darurat ke lokasi bencana. Dengan sinergitas antar instansi tersebut maka kebutuhan masyarakat terpenuhi dan menjamin kualitas pelayanan yang optimal.

c) Koordinasi vertikal BPBD dengan instansi pemerintah yang berkedudukan lebih tinggi

Tanggung jawab penanggulangan bencana banjir di kota tebing tinggi tidak hanya terletak di pemerintah kota tebing tinggi namun juga semua instansi vertikal terkait. Program-program kerja BPBD mendapat dukungan dari instansi vertikal berupa anggaran, sarana prasarana dan pelatihan SDM.

d) Adanya Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

Forum PRB merupakan forum yang berisi fasilitasi, monitoring yang membantu BPBD dalam program-program penanggulangan bencana banjir di kota tebing tinggi. Salah satu kelebihan forum PRB yaitu keikutsertaan masyarakat dalam forum tersebut sehingga diharapkan memberikan pengetahuan ke masyarakat tentang kebencanaan dalam rangka program kelurahan Tangguh bencana di Kota Tebing Tinggi.

3.7. Faktor Penghambat BPBD Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pihak terkait mengenai permasalahan penanggulangan banjir, penulis mendapatkan beberapa faktor yang menjadi kendala bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi permasalahan penanggulangan banjir di Kota Tebing Tinggi yaitu sebagai berikut

a) Sumber daya manusia yang belum memadai

Sumber daya manusia di BPBD belum mencapai jumlah yang memadai untuk menjamin terlaksananya penanggulangan bencana banjir dengan baik, selain itu belum semua sumber daya manusia yang ada di BPBD memiliki kualifikasi standar dalam penanggulangan bencana.

b) Sarana dan Prasarana yang menunjang keberhasilan penanggulangan bencana banjir

Sarana dan prasarana adalah unsur yang penting dalam pelayanan masyarakat terutama penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. Tidak terpenuhinya sarana prasarana maka akan menghambat kinerja BPBD. Dari hasil observasi peneliti sarana prasarana di tebing tinggi lengkap namun memiliki kekurangan dari segi kuantitas.

c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir

Penanggulangan bencana banjir merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan semua pihak terkhusus masyarakat, dimana masyarakat diharapkan tidak pasif bergantung pada BPBD tetapi turut serta dalam setiap program kerja BPBD dari proses perencanaan ataupun pengawasan.

3.8. Upaya Yang Dilakukan BPBD Kota Tebing Tinggi dalam Menghadapi Faktor Penghambat

Melalui observasi yang telah dilakukan peneliti BPBD Kota Tebing Tinggi telah menyadari faktor penghambat ataupun kekurangan dalam aspek internal maupun eksternalnya, maka daripada itu BPBD Kota Tebing Tinggi mengambil tindakan yang tersusun dan terukur untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

Permasalahan sumber daya manusia merupakan faktor penghambat penanggulangan banjir baik dari segi kualitas dan kuantitas sehingga membutuhkan perhatian khusus dari BPBD kota Tebing Tinggi. Langkah-langkah yang diambil BPBD untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melaksanakan pelatihan sebagai peningkatan skill agar kualifikasi sumber daya manusia dapat meningkat. Pelatihan juga bertujuan meningkatkan standar pelayanan di BPBD dan membuka pengetahuan baru bagi para pegawai sehingga BPBD yang dulunya pasif berinovasi menjadi aktif menumbuhkan ide-ide baru.

Sarana prasarana BPBD dilihat dari segi kelengkapan masih dikategorikan lengkap tetapi jumlahnya masih kurang untuk memaksimalkan kinerja BPBD, untuk itu upaya yang dilakukan BPBD mengatasi hal tersebut yaitu berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD provinsi Sumatera Utara, melalui hibah sarana prasarana dan bantuan dana. Namun hibah dan bantuan dana tidak dapat secara pasti didapatkan setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana BPBD melalui dana

hibah di maksimalkan dari swasta atau masyarakat. Sektor swasta di kota tebing tinggi memiliki potensi yang cukup besar untuk membantu penanggulangan banjir, dimana BPBD telah menyadari potensi tersebut dan merencanakan mekanisme bantuan Kerjasama swasta atau pembuatan *Memory Of Understanding (MoU)*.

Kultur masyarakat di tebing tinggi pada umumnya apatis terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya kesadaran muncul ketika telah terjadi bencana. Paradigma kesiapsiagaan di masyarakat belum terbentuk dengan baik maka dari itu upaya BPBD meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi kebencanaan, mengadakan forum kebencanaan, dan membentuk taruna siaga bencana. program-program tersebut telah ada di BPBD namun belum secara rutin diadakan dan dibutuhkan insentif bagi masyarakat agar turut serta dalam program-program pra bencana BPBD.

3.9. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan banjir di Kota Tebing Tinggi memberikan banyak dampak positif kepada masyarakat dalam rangka pengurangan dampak dari bencana banjir baik dampak material hingga korban jiwa. Penulis menemukan temuan penting yakni faktor penghambat dalam mitigasi bencana banjir di Kota Tebing Tinggi yaitu:

a) Sumber daya manusia yang belum memadai

Sumber daya manusia di BPBD belum mencapai jumlah yang memadai untuk menjamin terlaksananya penanggulangan bencana banjir dengan baik, selain itu belum semua sumber daya manusia yang ada di BPBD memiliki kualifikasi standar dalam penanggulangan bencana.

b) Sarana dan Prasarana yang menunjang keberhasilan penanggulangan bencana banjir

Sarana dan prasarana adalah unsur yang penting dalam pelayanan masyarakat terutama penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. Tidak terpenuhinya sarana prasarana maka akan menghambat kinerja BPBD. Dari hasil observasi peneliti sarana prasarana di tebing tinggi lengkap namun memiliki kekurangan dari segi kuantitas.

c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir

Penanggulangan bencana banjir merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan semua pihak terkhusus masyarakat, dimana masyarakat diharapkan tidak pasif bergantung pada BPBD tetapi turut serta dalam setiap program kerja BPBD dari proses perencanaan ataupun pengawasan.

Kemudian upaya yang dilakukan BPBD Kota Tebing Tinggi yaitu dengan melakukan:

Permasalahan sumber daya manusia merupakan faktor penghambat penanggulangan banjir baik dari segi kualitas dan kuantitas sehingga membutuhkan perhatian khusus dari BPBD kota Tebing Tinggi. Pelatihan juga bertujuan meningkatkan standar pelayanan di BPBD dan membuka pengetahuan baru bagi para pegawai sehingga BPBD yang dulunya pasif berinovasi menjadi aktif menumbuhkan ide-ide baru.

Sarana prasarana BPBD dilihat dari segi kelengkapan masih dikategorikan lengkap tetapi jumlahnya masih kurang untuk memaksimalkan kinerja BPBD, untuk itu upaya yang dilakukan BPBD mengatasi hal tersebut yaitu berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD provinsi Sumatera Utara, melalui hibah sarana prasarana dan bantuan dana. Namun hibah dan bantuan dana tidak dapat secara pasti didapatkan setiap tahunnya.

Kultur masyarakat di Tebing Tinggi pada umumnya apatis terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya kesadaran muncul ketika telah terjadi bencana. Paradigma kesiapsiagaan di masyarakat belum terbentuk dengan baik maka dari itu upaya BPBD meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi kebencanaan, mengadakan forum kebencanaan, dan membentuk taruna siaga bencana. Program-program tersebut telah ada di BPBD namun belum secara rutin diadakan dan dibutuhkan insentif bagi masyarakat agar turut serta dalam program-program pra bencana BPBD.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu Peran BPBD dalam upaya penanggulangan bencana banjir Kota Tebing Tinggi maka dapat disimpulkan peran yang dilakukan BPBD belum maksimal. Hal ini dapat dilihat

- a) Peran BPBD Kota Tebing Tinggi sebagai stabilisator telah berjalan dengan baik melalui peningkatan kesiapsiagaan dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Namun dalam bidang kesiapsiagaan belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran yang belum mencukupi untuk memaksimalkan kebijakan pra bencana.
- b) Kemudian belum adanya inovasi yang berasal dari internal BPBD menjadikan transformasi dan pembaharuan di BPBD melambat karena hanya menunggu kebijakan badan yang lebih tinggi kedudukannya.
- c) Peran BPBD Kota Tebing Tinggi telah diakui masyarakat melalui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPBD Kota Tebing Tinggi. Oleh sebab itu, BPBD akan terus berusaha meningkatkan kapasitasnya dengan perbaikan dari segi internal untuk penanggulangan bencana di Kota Tebing Tinggi. Peran sebagai modernisator di BPBD Kota Tebing Tinggi dilakukan dengan peningkatan kompetensi pegawai dengan sasaran setiap anggota BPBD memiliki kualifikasi penanganan kebencanaan. Modernisasi tersebut dilakukan cukup baik dengan antar pihak, diharapkan beberapa tahun kedepan semua anggota BPBD telah memiliki dasar pengetahuan kebencanaan.
- d) Dalam perannya sebagai pelopor sudah baik namun masih harus dibutuhkannya pertemuan-pertemuan agar koordinasi semakin terbina dengan baik. Ini disebabkan oleh pentingnya koordinasi antara dinas-dinas tersebut dengan BPBD Kota Tebing Tinggi sehingga terjadi tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan proses tanggap darurat dan pemberian bantuan.
- e) Sebagai organisasi pemerintah dalam perannya sebagai pelaksana sendiri BPBD terdepan dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Tebing Tinggi, BPBD Kota Tebing Tinggi berperan sentral. Namun dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di BPBD Kota Tebing Tinggi dan keterbatasan anggaran BPBD Kota Tebing Tinggi, maka tugas dan fungsi BPBD Kota Medan dalam penanggulangan bencana juga terbatas. Keterbatasan tersebut diatasi melalui koordinasi vertikal maupun horisontal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di Kota Tebing Tinggi saja sebagai lokus studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dan menggunakan metode yang berbeda sehingga temuan yang didapat sesuai dengan kondisi masyarakat terkini. Hasil temuan tersebut dapat berguna sebagai referensi kajian keilmuan dalam pembuatan kebijakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Tebing Tinggi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tebing Tinggi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). ADMINISTRASI, ORGANISASI DAN MANAJEMEN. Trussmedia.
- Creswell, J. W. (2016). Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar.
- H. Yunus, & Nawawi, W. (2013). Teori Organisasi. Unit Penerbitan Universitas Majalengka.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 106–125.
- Lexy J. Moleong. (2005). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir. (2011). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2003). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta.
- Raho, B. (2007). Teori Sosiologi Modern. Prestasi Pustakaraya.
- Raihan. (2017). Metodologi Penelitian. Universitas Islam Jakarta.
- Ramli, S. (2010). Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management). Dian Rakyat.
- Rosdiana. (2019). PERANAN PEMERINTAH DALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA : DALAM KONSEP PEMERINTAHAN POLITIK. *Meraja Journal*, 2(2), 109–117.
- Sandhyavitri, A., Fauzi, M., Gunawan, G., Sutikno, S., Amri, R., Siswanto, Suryawan, I., Mukti, M. A., & Riza, S. (2015). Mitigasi Bencana Banjir Dan Kebakaran. In Universitas Riau Press (Vol. 1). Universitas Riau Press.
- Siagian, S. (2012). Administrasi Pembangunan : Konsep, dimensi, dan strateginya (Vol. 8). PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Alfabeta.
- _____. (2017). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Alfabeta.
- Suwartono. (2014). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. In Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. CV ANDI OFFSET.
- Yuantari C, H. E. (n.d.). Buku Ajar : Manajemen Bencana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Kota Tebing Tinggi Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi

Sumber Lainnya

Ika, A. (2020, November 30). 25.297 Jiwa Terdampak Banjir TEBING Tinggi, Gubernur SUMUT: Perut DULU INI Untuk rakyat... KOMPAS.com. Diakses September 17, 2021, Dari <https://regional.kompas.com/read/2020/11/30/07163521/25297-jiwa-terdampak-banjir-tebing-tinggi-gubernur-sumut-perut-dulu-ini>.

Elison, D., & Akung. (2020, November 29). Berikut dampak Banjir di Tebing Tinggi – ANTARA NEWS Sumatera Utara. Antara News. Diakses September 17, 2021, Dari <https://sumut.antaranews.com/berita/351608/berikut-dampak-banjir-di-tebing-tinggi>.

ADRRN/UNISDR. 2009. Terminologi Pengurangan Resiko Bencana

